

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DENGAN
KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Korelasi di Desa Temuwangi Kecamatan Pedan
Kabupaten Klaten Tahun 2009-2010)¹

Oleh:
Nur Dewi Widyaningsih²

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine whether there is a positif and significant relationship between the level of public education with public awareness in rural development (the study of correlations in the Village District Temuwangi Pedan Klaten year 2009/2010). This research uses descriptive quantitative method. The population is all citizens in the years 2009-2010 Village Temuwangi aged 20-49 years, some 1468 souls. Samples were taken by cluster random sampling of some 147 souls. Variable data collection techniques and variable levels of public education awareness in rural development using a questionnaire. Technical analysis of the data used is the product moment correlation analysis to test the normality test requirements analysis, test and linearity test with a significance level of independent research by 5%. Based on the research results can be concluded that positif and significant relationship between the level of public education with public awareness in rural development (the study of correlations in the Village District Temuwangi Pedan Klaten years 2009-2010) as evidenced by $r_{xy} > r_{tabel}$ or $0.1789 > 0.176$. Then H_0 is rejected and H_a accepted.

KATA KUNCI: Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Pembangunan Desa.

¹ Ringkasan skripsi

² Mahasiswa PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang baru berkembang. Kehidupan dunia yang penuh kompetisi, lebih-lebih menghadapi era pasar bebas, kebodohan dan kemiskinan harus secepatnya diberantas, oleh karena itu dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya akan dapat dicapai melalui pendidikan, oleh karena itu pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan kemudian dalam ayat 2 ditegaskan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Untuk mengaktualisasikan amanah UUD 1945 tersebut, maka diatur penyelenggaraan pendidikan melalui undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1989 yang tidak memadai lagi serta perlu disempurnakan sesuai amanat perubahan UUD 1945. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan UUD dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia,

Pendidikan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kebijakan pemerataan pendidikan dimaksud untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan, dan yang dikelola secara efisien. Dengan demikian, program kesempatan belajar akan berhasil jika mutu, relevansi, dan efisiensi ditingkatkan pula pada waktu yang sama.

Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan simpulan Bintarto Tjokroamidjono dalam Slamet (1993: 79) bahwa "Suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara self propelling dan tumbuh menjadi bangsa yang maju apabila telah memenuhi minimum jumlah dan mutu (termasuk relevansi dengan pembangunan) dalam pendidikan penduduknya". Pendidikan harus terselenggara secara merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Selain itu keyakinan bahwa pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpadang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan dunia internasional, boleh dikatakan tidak ada keraguan lagi.

Pendidikan menjadi satu hal pendukung dalam keberhasilan pembangunan William S. Plat berpendapat bahwa peran pendidikan mencakup "Mengembangkan teknologi baru, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa, pelaku generasi dan penciptaan budaya dan konsumen barang dan jasa". (Redja Mudyahardjo, 2002: 506-508).

Dari keterangan di atas menyatakan bahwa peran pendidikan dalam pembangunan ada lima yaitu mengembangkan teknologi baru yang untuk mendukung pembangunan yang mana orang yang telah mengikuti pendidikan diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan mereka untuk selalu berinovasi secara berkelanjutan, lalu orang yang telah mengenyam pendidikan diharapkan menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi dimana membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam dan teliti untuk menghasilkan karya atau hasil kerja yang baik dan standar, selain itu orang yang terdidik diharapkan dan harus bisa menjadi tenaga yang produktif yang berguna untuk masyarakat luas, tidak hanya sampai di sini saja tapi masih ada dua lagi yaitu sebagai pelaku generasi dan penciptaan kebudayaan

dan sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga terdidik tadi.

Hakikat pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan itu dapat berhasil apabila masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Paradigma sentralistik yang dianut pemerintah selama beberapa dekade silam telah menumbuhkan opini masyarakat bahwa tanggung jawab utama pembangunan terletak ditangan pemerintah. Perencanaan pembangunan yang demikian telah melemahkan kemampuan masyarakat untuk memiliki kesadaran dan menempatkan masyarakat sebagai bagian pasif dari sistem pembangunan. Kesadaran dalam pembangunan tercermin dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dituntut untuk selalu ada dalam setiap program pembangunan. Kesadaran untuk berpartisipasi berasal dari warga itu sendiri, sedangkan kesempatan berpartisipasi dari pihak luar yang memberi kesempatan. Kesadaran itu juga harus didukung dengan kemauan dan kemampuan dari masyarakat itu sendiri, sedangkan kemampuan dan kemauan tersebut berhubungan erat dengan sumber daya manusia (SDM) yaitu pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Akses yang luas dan memadai akan mempercepat tingginya tingkat pendidikan masyarakat, dan pada gilirannya akan menumbuhkan dan menanamkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat

pendidikan yang dimiliki masyarakat maka semakin banyak informasi dan pengertian tentang pembangunan sebaliknya apabila Tingkat pendidikan yang rendah umumnya bergandengan dengan informasi dan pengertian yang serba terbatas, dengan demikian kesempatan pun serba terbatas.

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001: 69) menyatakan bahwa "Secara etimologis kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari kata *paes* yang artinya anak, dan *agogos* yang berarti penuntun anak. Dari kata-kata tersebut lalu timbul istilah *paedagogiek* yang secara umum berarti ilmu pendidikan atau ilmu mendidik".

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001: 70-79) berpendapat bahwa "Pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan sengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung secara menerus".

Dari definisi lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Usaha sadar, ini berarti terjadi situasi pendidikan tersebut dilaksanakan atas kesadaran si pendidik.
- 2) Orang dewasa, bahwa pelaksanaan pendidikan haruslah orang yang sudah dewasa.
- 3) Disengaja, ini berarti bahwa proses pendidikan memang disengaja direncanakan secara sistematis dan matang.
- 4) Bertanggung jawab, bahwa semua tindakan harus dapat

dipertanggung jawabkan secara moral berdasarkan kaidah- kaidah atau norma- norma yang berlaku.

- 5) Dewasa sebagai tujuan, baik fisik maupun psikis yang diwarnai oleh nilai- nilai bangsanya. Untuk itu di Indonesia yang harus diwarnai Pancasila dan UUD 1945.
- 6) Terus menerus (kontinyu):
 - a) Pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan.
 - b) Pendidikan itu tidak ada berhentinya (pendidikan seumur hidup)

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang sengaja dilakukan untuk membantu anak dalam mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun secara psikisnya melalui orang dewasa yang bertanggung jawab.

Selain itu, untuk menegaskan arti dari pendidikan secara yuridis, pemerintah telah menyebutkan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu di dalam Pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Koentjaraningrat (1990: 143) menyatakan bahwa "Masyarakat di dalam bahasa Inggris istilahnya adalah

society yang berasal dari kata Latin socius, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi".

Pengertian yang berbeda mengenai masyarakat dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang mereka ikuti yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Selain itu Darsono Wisadirana (2004: 23) menyatakan bahwa "Masyarakat merupakan hasil dari suatu periode perubahan kebudayaan dan akumulasi budaya".

Dari definisi tersebut diatas maka yang disebut dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang bergaul dan berada dalam tempat atau daerah tertentu serta mereka saling berinteraksi. Sekelompok manusia tersebut memiliki kebudayaan yang sama dan terikat pada rasa identitas bersama.

Kesadaran manusia sangat tinggi dalam mewujudkan kehidupan ini. Menurut A.W. Widjaja (1997: 14) "Kesadaran adalah sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada". Sedangkan kesadaran menurut Poerwadarminto (1983: 731) adalah "Keadaan insaf, yakin, merasa, tahu dan mengerti".

Sementara itu Gerungan berpendapat bahwa "Kesadaran adalah suatu aktivitas jiwa dalam hubungannya dengan lingkungan yang

menyadari adanya benda-benda di sekitar kita" (Gerungan, 1996: 21) .

Berdasarkan pengertian kesadaran menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah keadaan insaf seseorang berdasarkan sikap tahu, mengerti, merasa dan ingat.

Pengertian pembangunan menurut Totok Mardikanto (2010: 2) menyatakan bahwa "Pembangunan yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, sekarang telah berkembang sebagai terjemah dari beragam istilah asing. Dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai terjemahan dari istilah development, growth and change, modernization, atau juga progress".

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan, diungkapkan dalam beragam rumusan dan oleh Tiyadi diungkapkan bahwa "Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi terciptanya kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu" (Totok Mardikanto, 2010: 3).

Khairuddin H (1992: 3-4) menyatakan bahwa "Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya serta desa dapat diartikan dalam arti umum dan khusus".

Dalam Khairuddin H (1992: 3-4) ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai desa antara

lain; V.C. Finch menyatakan bahwa "The village is principally a place of residence and not primarily a business center". Yang intinya desa adalah suatu tempat tinggal dan bukan merupakan pusat perdagangan, sedangkan William Ogburn menyatakan bahwa "Desa adalah organisasi total kehidupan masyarakat (sosial) dalam suatu areal yang terbatas". Sementara itu Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa "Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri". Lain halnya dengan P.J.M. Nas menyatakan bahwa "Desa dapat dilihat dari beberapa segi, yakni morfologi, kriterium jumlah penduduk, hukum, ekonomi dan sosial".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Temuwangi Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten tahun 2009-2010. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh anggota masyarakat yang berumur 20-49 tahun yang ada di Desa Temuwangi yang berjumlah 1468 orang. Sugiyono (2009: 118) menyatakan bahwa "Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi". Peneliti ini mengambil sampel 10% dari populasi yang ada ini dikarenakan populasi yang ada ditempat penelitian cukup banyak yaitu sebesar 1468 orang, jadi sampel yang dipakai ada 147 orang. Adapun

pelaksanaanya ditempuh dengan cara teknik Cluster Sampling (Area Sampling).

Sebelumnya angket yang telah disusun perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan adanya kata-kata yang tidak dimengerti oleh warga masyarakat sebagai sampel penelitian, dan juga untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir angket tersebut. Uji coba instrument ini diberikan kepada masyarakat di luar sampel. Yang telah ditentukan sebanyak 70 orang.

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas butir item angket tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa menggunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh pearson (Suharsimi Arikunto, 2006: 170)

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dari perhitungan angket tingkat pendidikan masyarakat yang telah dilakukan dan kemudian dikonsultasikan dengan r_{tabel} , maka jika $r_{hitung} > 0,361$ berarti butir pertanyaan tersebut valid. Dan jika $r_{hitung} < 0,361$ berarti butir pertanyaan tidak valid.

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban jawaban tertentu. Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas menggunakan teknik belah dua. Reliabilitas angket dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data tingkat pendidikan masyarakat diketahui (N) = 147, nilai tertinggi adalah 5, sedangkan nilai terendah 1. Range (R) = nilai max - nilai min = 4 dan jumlah kelas (K) = $1 + 3,322 \log N = 8,19$ yang dibulatkan menjadi 8, untuk interval (I) = $R/K = 4/8 = 0,5$. Mean (\bar{x}) = 3,10. Frekuensi tertinggi 44 pada kelas interval 2,8 – 3,3 serta diketahui frekuensi terendah 0 pada kelas interval 2,2 - 2,7 dan 3,4 - 3,9 serta 5,2-5,7.

Hasil pengumpulan data kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa dapat diketahui (N) = 147, nilai tertinggi adalah 131, sedangkan nilai terendah 77. Range (R) = nilai max - nilai min = 54 dan jumlah kelas (K) = $1 + 3,322 \log N = 8,19$ yang dibulatkan menjadi 8, untuk interval (I) = $R/K = 54/8 = 6,8$. Mean (\bar{x}) = 98,55. Frekuensi tertinggi 49 pada kelas interval 97,7 – 104,5 serta diketahui frekuensi terendah 1 pada kelas interval 118,4 – 125,2.

Teknik statistik sebagai analisis data, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah sampel diambil secara random atau acak, bentuk distribusi X dan Y merupakan garis lurus atau linier serta Y dependen pada X. Hipotesis sebelum diuji, harus menguji persyaratan analisis data dengan uji normalitas, uji linieritas dan uji independen. Uji normalitas

dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel dari distribusi normal atau tidak.

Uji normalitas variabel tingkat pendidikan masyarakat (x). Setelah dilakukan perhitungan bahwa pada taraf signifikansi 5% didapat $L_{hitung} = 0,0705$ sedangkan $L_{tabel} = 0,0731$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa L_{hitung} lebih kecil dari pada L_{tabel} atau $0,0705 < 0,0731$. Maka dinyatakan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.

Uji Normalitas Variabel Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Y). Setelah dilakukan perhitungan bahwa pada taraf signifikansi 5% didapat $L_{hitung} = 0,0701$ sedangkan $L_{tabel} = 0,0731$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa L_{hitung} lebih kecil dari pada L_{tabel} atau $0,0701 < 0,0731$. Maka dinyatakan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.

Uji Linieritas, Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variable bebas (X) dengan variable terikat (Y) terdapat hubungan yang linier atau tidak. Setelah dilakukan perhitungan bahwa pada taraf signifikansi 5% diperoleh $F_{tabel} = 2,68$ Karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $0,408 < 2,68$ maka dinyatakan bahwa X linear terhadap Y.

Uji independensi dilakukan untuk membuktikan, bahwa antar variabel bebas tidak berhubungan atau independen. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} = 4,31$. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai F_{tabel} dengan N = 131 dan

taraf signifikansi 5% diperoleh nilai $F_{\text{tabel}} = 3,92$. Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $4,31 > 3,92$ maka dapat dikatakan bahwa X dependen terhadap Y, jadi X dapat memprediksi Y.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang dikemukakan dapat diterima bila fakta-fakta yang ada dapat mendukung pernyataan dalam hipotesis, sebaliknya hipotesis ditolak apabila fakta-fakta empiris tidak dapat mendukung pernyataan hipotesis.

Menghitung Koefisien Korelasi antara X dengan Y. Melihat dari hasil perhitungan antara X dengan Y, diperoleh nilai $r_{xy} = 0,1789$. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai r_{tabel} pada $N = 147$ dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,176, berdasarkan hal tersebut $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ atau $0,1789 > 0,176$. berarti ada hubungan antara variabel X dan Y.

Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan untuk menguji signifikansi hubungan. Setelah dilakukan perhitungan bahwa pada taraf signifikansi 5% diperoleh $t_{\text{hitung}} = 2,191$. Karena $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $2,191 > 1,984$, maka dinyatakan bahwa koefisien korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa sebesar 2,191 adalah berarti..

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh $r_{xy} = 0,1789$ dengan sampel 147 orang pada taraf signifikansi 5% diperoleh $r_{\text{tabel}} = 0,176$. Maka hasilnya $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ atau $0,1789 > 0,176$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat ditafsirkan ada

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat (X) dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada uji hipotesis yang menyatakan "Ada hubungan yang signifikan tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa" dapat diterima. Ada hubungan berarti antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa diketahui dari besarnya harga koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar $r_{xy} = 0,1789$, dengan sampel 147 orang pada taraf signifikansi 5% diperoleh $r_{\text{tabel}} = 0,176$. Maka keputusan akhirnya adalah $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ atau $0,1789 > 0,176$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan hal tersebut tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat berhubungan dengan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa

Ada satu teori yang sesuai dengan hasil analisis data pada penelitian ini yaitu Human Capital Teory (Heinrich von Thunen) diungkapkan bahwa "Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan. Dengan semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan, maka semakin tinggi tingkat produktifitas." Dapat diartikan bahwa apa bila

seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka orang tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi pula. "(<http://sociologystudy.wordpress.com/2012/04/30/makalahsosiologi-kependidikan-human-capital>).

Berdasarkan analisa dan interpretasi hasil analisa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu hal yang memiliki hubungan yang erat. Dimana tingkat pendidikan merupakan salah satu dasar agar memiliki pengetahuan, pengertian, bersikap dan juga perilaku terhadap kesadaran masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan dari deskripsi data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menggunakan korelasi product moment, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang selanjutnya diperoleh harga $r_{xy} = 0,1789$ sedangkan harga r_{tabel} $N = 147$ dengan taraf signifikansi 5% diperoleh $r_{tabel} = 0,176$, karena $r_{xy} > r_{tabel}$ atau $0,1789 > 0,176$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Meskipun hasil akhir menunjukkan bahwa $r_{xy} > r_{tabel}$ tetapi selisihnya hanya 0,0021, sehingga tingkat pendidikan masyarakat tidak terlalu berpengaruh

terhadap kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa tetapi bisa karena hal yang lain, misalnya kedudukan sosial dimasyarakat, pekerjaan yang dimiliki, penghasilan yang diperoleh dan lain sebagainya.

Beranjak dari kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

Saran Bagi Masyarakat Antara Lain:

- Masyarakat disarankan lebih mengutamakan pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk generasi yang akan datang agar pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku mereka dapat lebih baik dan luas dalam bidang pembangunan.
- Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi motivator bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan dibawahnya atau masyarakat yang lain.

Saran Bagi Pemerintah Desa antara lain:

- Bagi pemerintah desa hendaknya dalam perekrutan panitia pembangunan desa lebih bijak dengan mengikut sertakan masyarakat yang berpendidikan dasar atau menengah.
- Dan pemerintah desa disarankan memberi kesempatan yang sama untuk masyarakat dapat ikut dalam pembangunan desa.
- Pemerintah desa disarankan memberi keluasaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa agar di kelola masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Anonim. 2007. Undang-Undang Dasar 1945
- Bintarto Tjokroamidjoyo. 1989. Interaksi desa-kota dan permasalahannya. Jakarta: Gamalian Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Wipress.
- Gerungan. W.A. 1996. Psikologi Sosial. Bandung: Eresco.
- Heinrich von Thunen.
<http://sociologystudy.wordpress.com/2012/04/30/makalah-sosiologi-kependidikan-human-capital/> (diakses 18.30, hari Rabu, 2 Mei 2012)
- Khoiruddin H. 1992. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty
- Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi (cetakan kedelapan). Jakarta: Rineka Cipta
- Poerwadarminto. 1983. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: BN. Pesrada
- Redja Mudyahardjo. 2002. Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D Cetakan ke 7. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cetakan Ke 13). Jakarta: Bina Aksara.
- Totok Mardikanto. 2010. Metode Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: UNS Press
- . 2010. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: UNS Press
- Widjaja, A. W. 1997. Upaya Pembaharuan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.